

IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN *GROUP* TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

(Studi Kasus : Sektor Pertambangan Batubara)

Oleh:

Hartana¹⁾, Nindyo Pramono²⁾, Sulistiowati³⁾

INTISARI

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam disertasi ini adalah *pertama*, mengetahui dan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan ekspansi perusahaan *group* khususnya pada sektor pertambangan batubara. *Kedua*, mengetahui mengenai pelaksanaan ekspansi perusahaan *group* yang terjadi di sektor pertambangan batubara. *Ketiga*, mengetahui, menganalisis dan menemukan implikasi dari ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut, *Pertama*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengaturan pembatasan perusahaan *group* yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Adapun kepemilikan luas maksimal IUP dalam perusahaan *group* tidak dibatasi. *Kedua*, bentuk ekspansi perusahaan *group* dalam sektor pertambangan batubara yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan membentuk *holding company*, akusisi, dan *joint venture*. Adapun motif utama pelaku usaha melakukan ekspansi tersebut yaitu motif ekonomi dan motif psikologi. *Ketiga*, ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada Penyalahgunaan Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar. Konsekuensinya adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Dari 5 (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan *group*, jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Pengaturan ekspansi, pelaksanaan ekspansi, keadilan dalam persaingan

1) Mahasiswa Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

2) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

3) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**IMPLICATION OF *GROUP* COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY
PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
(Study Case : Coal Mining Industry)**

Author :

Hartana ¹⁾, Nindyo Pramono ²⁾, Sulistiowati ³⁾

ABSTRACT

In relation with the coal mining business growth in Indonesia for the past 10 years, than it must also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than the purpose of this dissertation are, *first*, to know and to find the Laws which specifically regulates the expansion buoying of Group Company especially in coal mining sector. *Second*, to know about the implementation of Group Company expansion in coal mining sector. *Third*, to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition.

This research uses the Juridical Empirical Method, a procedure of solving research problems by first, researching secondary data to continue with the primary data research on field. As for the type of the research are Literature and Field research.

The results of this research are, *First*, that the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining regulates about the buoying of group company, mentioning that the IUP and IUPK owners are banned from involving their sister company and/or their affiliation in mining service industry located in their mining area, except they have the Minister's License. Meanwhile maximum area ownership of IUP in group company is not restricted. *Second*, the most common group expansion in coal mining industry are by establishing holding company, acquisition and joint venture. The principal motive of these actions are economy and psychology. *Third*, group company expansion in coal mining industry implicates on abuse of dominant position and market control. The consequence are the addition of several new companies and also directly implies the ownership of the subsidiary's shares by the parent company. Of the 5 (five) coal mining companies studied when doing corporate actions, so that into 1 (one) group companies, the amount of coal production does not reach 50%. It is not proven to be denied Article 17 of Law no. 5 of 1999.

Key words : Expansion Regulation, Expansion Practice, Fairness in Competition

1) Doctorate Student, Faculty of Law, University of Gadjah Mada

2) Professor Faculty of Law, University of Gadjah Mada

3) Professor Faculty of Law, University of Gadjah Mada